



LAPORAN EVALUASI HASIL (DALEV)

terhadap

 **Rencana Kerja (RENJA-PD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa Laporan Evaluasi Hasil terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 telah dapat disusun dengan baik.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini merupakan pelaksanaan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 259 yang mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi, dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian Hasil evaluasi Renja PD provinsi menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi untuk tahun berikutnya.

Laporan Evaluasi Hasil terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan capaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan Renja PD, guna mendukung pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional tahun 2023. Evaluasi hasil Renja PD ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi indikator target kinerja dan anggaran berdasarkan DPA Perangkat Daerah dengan indikator target kinerja dan anggaran dalam Renja Perubahan PD Setda Tahun 2023. Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Renja Sekretariat Daerah untuk tahun berikutnya.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran	2
D. Program dan Kegiatan	3
BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA	17
A. Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah	17
B. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Renja Perangkat Daerah	26
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI	40
BAB IV PENUTUP	41

DAFTAR LAMPIRAN

Judul

1. Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah provinsi Kepulauan Bangka Triwulan II Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk periode 1 (satu) tahun demi mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran disebut rencana kerja. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan rencana kerja tersebut yang didasari pada perencanaan strategis yang dikenal sebagai Renstra atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode lima tahunan yang mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode dua puluh lima tahunan.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan pelaksanaan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 259 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) yang mengamanatkan bahwa (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD Provinsi; (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan; (3) Hasil evaluasi Renja PD provinsi menjadi bahan penyusunan Renja PD provinsi untuk tahun berikutnya; (4) Kepala PD provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pengendalian dan Evaluasi hasil renja PD baik berupa kinerja dan keuangan merupakan capaian kinerja yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang menggambarkan keberhasilan visi dan misi Kepala PD berdasarkan Renstra PD. Evaluasi hasil Renja PD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan berupa anggaran kas yang dibagi setiap triwulan. Sehingga terkait dengan uraian diatas, maka perlu dilakukan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyediakan data capaian kinerja dan evaluasi terkait pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan maksud untuk melaksanakan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sebagai bahan penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun selanjutnya.

Adapun tujuan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi pada Triwulan II Tahun 2023
2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja PD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra PD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah (RKPD).

C. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD Provinsi dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/Subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Sekretariat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Setda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut maka Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 1. yang mengacu kepada Renstra Perubahan Setda 2023-2026 berikut:

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata			
Misi Ke-5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas		Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi PD Setda yang berkualitas		Pencapaian RB PD Setda
1		Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan

2		Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan
3		Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan
4		Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai RB PD Setda

D. Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi serta program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih 2023-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta Indikator kinerja dan Kelompok sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, ditetapkan dengan nomenklatur berdasarkan *Kepmen Nomor 050-3708 Tahun 2020* antara lain sebagai berikut:

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Indikator Kinerja : Nilai Sakip Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran : Perencanaan Perangkat Daerah

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja : Nilai Sakip Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran : Perencanaan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator : Jumlah Dokumen Evaluasi PD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
Kelompok Sasaran : Keuangan Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Indikator : Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan

 - 2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
 - Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pemenuhan Kewajiban Pelunasan PBB
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Indikator : Jumlah Unit Pembayaran PBB Gedung Pemerintah

 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
 - Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian
 - a. Sub Kegiatan Pangadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Indikator : Jumlah Pakaian Dinas ASN beserta perlengkapannya yang diadakan
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Perundang-Undangan
 - Indikator : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Perundang-Undangan

 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
 - Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pelayanan Umum
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Alat listrik dan Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
 - Indikator : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan di Lingkungan Setda
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Indikator : Jumlah Capaian Fasilitasi Kunjungan Tamu
- i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
 - Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pengadaan Barang bagi Pengguna
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Indikator : Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
 - Indikator : Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
 - Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Indikator : Jumlah Capaian Benda Pos yang dibeli dan Jasa pengiriman Surat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik
 - Indikator : Tagihan rekening listrik , Air, Telepon/Fax, TV Kabel, Virtual Meeting yang dibayarkan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Indikator : Jumlah Tenaga PHL yang dipekerjakan
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
 - Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pelayanan Pemeliharaan Barang
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan
 - Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Meubel
 - Indikator : Jumlah Meubelair yang dipelihara
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya
 - Indikator : Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Indikator : Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan/Rehabilitasi
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara
- 8) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
- Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pemenuhan Hak KDH dan WKDH
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Indikator : Jumlah KDH dan WKDH yang Menerima Gaji dan Tunjangan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
 - Indikator : Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Indikator : Jumlah yang melaksanakan Medical Check Up
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
 - Indikator : Jumlah Capaian penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
- 9) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
- Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pelayanan Kerumahtanggaan
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
 - Indikator : Jumlah Capaian Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 10) Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal
- Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pelayanan Komunikasi Pimpinan
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Indikator : Jumlah Capaian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- 11) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Indikator Kinerja : Survei Kepuasan Pelayanan Internal

Kelompok Sasaran : Kepuasan atas Pelayanan Keprotokolan

a. Sub Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Acara

- Indikator : Jumlah Capaian Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

- Indikator : Jumlah Capaian Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

Indikator : Persentase Kebijakan Manajemen Perubahan , Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan TataLaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Tersusun

Program ini dilaksanakan untuk mengeluarkan rekomendasi kebijakan bidang penataan organisasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Indikator : Persentase Kebijakan Manajemen Perubahan , Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan TataLaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Tersusun

Kelompok Sasaran : Kebijakan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

- Indikator : Jumlah Usulan PD yang Menyusun Kebijakan Evaluasi Terhadap Organisasinya

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyusun Kebijakan Penataan Organisasi berdasarkan hasil Evaluasi

c. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

- Indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatannya

2) Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator : Persentase Kebijakan Manajemen Perubahan , Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan TataLaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Tersusun

Kelompok Sasaran : Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

a. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Kebijakan Pelaksanaan Tugas Tim dan Dokumen Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sesuai Standar RB

b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

- Indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penyusunan Penetapan Kinerja

c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

- Indikator : Jumlah PD yang menyusun kebijakan Laporan Evaluasi Implementasi Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja sesuai standard RB
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 - Indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Kebijakan Peta Proses Bisnis (Probis) dan SOP
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
 - Indikator : - Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan, Pelayanan Prima, Pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan teknologi informasi untuk pelayanan.
 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Indikator : Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang tersusun

Program ini dilaksanakan untuk mengeluarkan rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Tersusun
 - Kelompok Sasaran : Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
 - Indikator : Jumlah Dokumen Batas Wilayah yang Terealisasi
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - Indikator : Terlaksananya Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Umum
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - Indikator : Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang tersusun
 - Kelompok Sasaran : Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung dan Pemkab/Kota
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - Indikator : Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan keluar negeri KDH, DPRD dan ASN
 - Terselenggaranya Pelantikan KDH & WKDH
 - Terselenggaranya Rakor Gubernur dgn Bupati/Walikota
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - Indikator : Jumlah Dokumen Penataan Urusan yang terealisasi

- c. Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Indikator : Jumlah Dokumen EKPPD, LPPD, LKPJ KDH yg tersusun
- 3) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Indikator : Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang tersusun
 - Kelompok Sasaran : Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung dan Pemkab/Kota
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
 - Indikator : Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah yang terselenggara Jumlah Proposal Kerjasama Pemda yg Terealisasi

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indikator : Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat
 Program ini dilaksanakan untuk mengeluarkan rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
 - Indikator : Persentase Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun
 - Kelompok Sasaran : Pembinaan Mental spiritual
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Sarana dan Prasarana Spiritual
 - Terseleksinya Petugas Haji Daerah
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kelembagaan Bina Spiritual
- 2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - Indikator : Persentase Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun
 - Kelompok Sasaran : Kebijakan Pelayanan Dasar
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Pendidikan
 - Jumlah Dana Bansos yang disalurkan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kesehatan
 - Terlaksananya Evaluasi dan analisis proposal Bansos dan Hibah
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Sosial
 - Terealisasinya dana bantuan hibah

- 3) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 - Indikator : Persentase Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun
 - Kelompok Sasaran : Kebijakan Non Pelayanan Dasar
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - Indikator : Jumlah bahan usulan Rekomendasi Bidang kepemudaan, Olah raga, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan perhubungan
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - Indikator : Jumlah bahan usulan Rekomendasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

Indikator : Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan produk hukum daerah oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - Indikator : Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan
 - Kelompok Sasaran : Kebijakan Dalam Penyusunan Produk Hukum
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - Indikator : Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah Berupa Peraturan Gubernur
Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah Berupa Raperda
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - Indikator : Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah Berupa Keputusan Gubernur
 - c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - Indikator : Jumlah Bahan Pendokumentasian Produk Hukum daerah dan Naskah Hukum Lainnya
Jumlah Bahan Penyusunan Naskah Hukum Lainnya
Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - Indikator : Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Indikator : Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan
 - Kelompok Sasaran : Kebijakan Bantuan Hukum

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - Indikator : Jumlah Bahan Penyelesaian Sengketa Hukum untuk Proses persidangan
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM
 - Indikator : Jumlah Bahan Pelaporan RANHAM
Jml Bahan Usulan pemberian Bantuan Hukum Masy Miskin

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Tersusun

Program ini dilaksanakan untuk mengeluarkan rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Tersusun
 - Kelompok sasaran : Kebijakan Perekonomian
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Ekonomi Makro
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Ekonomi Mikro
- 2) Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Tersusun
 - Kelompok Sasaran : Kebijakan Sumber Daya Alam
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - Indikator : Jumlah Bahan usulan Rekomendasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air
- 3) Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang

Tersusun

Kelompok Sasaran : Kebijakan BUMD dan BLUD

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi BUMD dan BLUD

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Tersusun

Program ini dilaksanakan untuk mengeluarkan Rekomendasi kebijakan bidang Pembangunan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Tersusun

Kelompok Sasaran : Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah

2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Tersusun

a. Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

- Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Indikator : Nilai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator : Nilai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Sub kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa
 - Indikator : Jumlah Rumusan kebijakan Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Indikator : Persentase Tindak Lanjut Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- c. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Indikator : Jumlah Laporan Pemantauan/Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - Indikator : Nilai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPB)
 - Kelompok Sasaran : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - a. Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
 - Indikator : Jumlah Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
 - b. Sub kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Indikator : Jumlah Sistem PBJ yang dikembangkan
 - c. Sub kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Indikator : Jumlah Laporan Penggunaan Sistem Informasi PBJ
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Indikator : Nilai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPB)
 - Kelompok Sasaran : SDM, Kelembagaan
 - a. Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 - Indikator : Jumlah Laporan Pembinaan SDM PBJ
 - b. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Indikator : Jumlah Lembaga UKPBJ yang dibina
 - c. Sub kegiatan Pedampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
 - Indikator : Jumlah Laporan tentang Pedampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun

Program ini dilaksanakan untuk mengeluarkan rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun
 - Kelompok Sasaran : Kebijakan Administrasi pembangunan
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah
 - Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah
- 2) Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Indikator : Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang

tersusun

Kelompok sasaran : Kebijakan Pelaksana Pembangunan Daerah

a. Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator : Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Capaian Kinerja Pembangunan daerah

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

A. Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, dengan memperhatikan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKP tahun 2023 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD tahun 2023 maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun mencakup 8 program dan 31 kegiatan. Untuk memastikan keselarasan antara program kegiatan yang ada di Renja PD Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah tahun 2023-2026, maka berikut ini disajikan perbandingan pada Tabel 2.

Tabel 2
Perbandingan antara Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di dalam Renja PD Sekretariat Daerah Tahun 2022 terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di dalam Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

NO	Renstra PD 2017-2022 (Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Kepmen 050-3708)	Renja PD Tahun 2022 (Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Kepmen 050-3708)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sesuai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sesuai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sesuai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sesuai
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sesuai
	Pangadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pangadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Bimbingan teknis Implementasi Perundang-Undangan	Bimbingan teknis Implementasi Perundang-Undangan	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sesuai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	
	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sesuai
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Meubel	Pemeliharaan Meubel	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
9	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sesuai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunja	
10	Kegiatan Fasilitas Kerumahan Sekretariat Daerah	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Sesuai
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
11	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Sesuai

	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
12	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Sesuai
	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Acara	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Acara	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	
II	<i>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</i>	<i>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</i>	Sesuai
1	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sesuai
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	
2	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	
III	<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</i>	<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</i>	Sesuai
1	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sesuai

	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
2	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sesuai
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi & Penyelenggaraan Pemerintahan	
3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Sesuai
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	
IV	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
1	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental	Sesuai
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
2	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Sesuai
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	

	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
3	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Sesuai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
V	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Sesuai
1	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Sesuai
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	

	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	
2	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Sesuai
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	
	Fasilitasi penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM	Fasilitasi penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM	
VI	<i>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</i>	<i>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN</i>	Sesuai
1	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Sesuai
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	
2	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Sesuai
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
3	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Sesuai

	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
VII	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Sesuai
1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan	Sesuai
	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan	
2	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sesuai
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan	
3	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sesuai
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan	

	Pedampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Pedampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
VIII	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
1	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sesuai
	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah	
2	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sesuai
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	

B. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Renja Perangkat Daerah

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari Program/kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja PD yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II (bulan April sampai dengan bulan Juni) Tahun 2023.

Untuk target kinerja kegiatan menyesuaikan hasil refocussing kegiatan dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2023. Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata

capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Perangkat Daerah lain.

Adapun tabel capaian kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 sbb :

Keterangan:

SR	: Sangat Rendah	(≤ 50 %)
R	: Rendah	(51 % ≤ 65 %)
S	: Sedang	(66 % ≤ 75 %)
T	: Tinggi	(76 % ≤ 90 %)
ST	: Sangat Tinggi	(91 % ≤ 100 %)

Berdasarkan tabel capaian kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 terlihat bahwa dari 8 program dan 31 kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2023, rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan ke II Tahun 2023 sebesar 60,93 % dengan predikat rendah sedangkan untuk rata-rata capaian anggaran seluruh program sebesar 34,56 % dengan predikat sangat rendah

Selain itu untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 penjabarannya tertuang pada formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Biro berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

BAB III

KENDALA YANG DIHADAPI

Berdasarkan hasil capaian kinerja Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023, dapat diketahui bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk capaian anggaran dari seluruh program sebesar 60,93 % dengan predikat kinerja dari seluruh program rendah dan untuk rata-rata capaian kinerja berpredikat sangat rendah yaitu sebesar 34,56 %.

Pada Triwulan II ini terkendala dengan belum optimalnya pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran sehingga menghambat pencapaian target kinerja dan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Pengendalian dan Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah TRIWULAN II Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 mencakup 8 program dan 31 kegiatan.
2. Pencapaian target realisasi Sekretariat Daerah prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TRIWULAN II Tahun 2023 untuk realisasi capaian kinerja sebesar 60,93 % dengan predikat rendah sedangkan untuk rata-rata capaian anggaran seluruh program sebesar 34,56 % dengan predikat sangat rendah.

B. REKOMENDASI

Sebagai upaya perbaikan pencapaian target kinerja untuk pelaksanaan Renja tahun 2023 maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar selalu memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi renja periode sebelumnya agar dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan Program Kegiatan.
- b. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar selalu konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sebagaimana telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- c. Melakukan pertemuan secara berkala terkait upaya dalam mencapai target kinerja dan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dengan hasil yang maksimal;
- d. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan dan menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah laporan evaluasi secara rutin dan tepat waktu.

Demikianlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini disusun berdasarkan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Atas segala bentuk masukan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEP. BANGKA BELITUNG



Dr. Drs. NAZIARTO, SH., MH
NIP. 19640321 199103 1 009

